ABSTRAK

Prinsip "persamaan pada pokoknya" merupakan dasar utama dalam penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berperan dalam proses penerimaan permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merek. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa keberadaan unsur pembeda atau niat tidak baik pemohon dapat memperkuat klaim pelanggaran. Penyempurnaan interpretasi yudisial dan harmonisasi dengan prinsip perlindungan merek menjadi urgensi untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan pendaftaran merek dengan itikad buruk. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis. Data skunder menjadi sumber data dalam penelitian ini dengan jenis data berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Tekhnik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada pasal 21 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan langkah pertama dalam menekan angka peningkatan pada sengketa merek, hal ini pun berkaitan dengan peran DJKI dalam proses publikasi pendataran merek. Sehingga, DJKI dapat merubah metode publikasi yang dapat mudah diakses bagi para pihak pendaftar merek. Putusan hakim dalam memutus sengketa merek yang diteliti, mengacu pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016, pasal ini mengatur secara khusus tentang pembatalan suatu merek yang terdaftar. Berdasarkan pertimbangan pada asas itikad baik dengan mempertimbangkan tidak adanya meniru atau membonceng popularitas dari suatu merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan asas perbuatan melawan hukum dengan unsur menimbulkan penyesatan informasi atau kondisi dimana khalayak ramai bingung dalam mengenali identitas dari suatu produk yang dimaksud.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Persamaan Merek, Sengketa Merek.

ABSTRACT

The principle of "similarity in substance" is the primary basis for resolving trademark disputes in the Indonesian Commercial Court. The Directorate General of Intellectual Property (DJKI) plays a role in the process of accepting applications for registration of trademark intellectual property rights (IPR). Court decisions indicate that the presence of distinguishing elements or bad faith on the part of the applicant can strengthen claims of infringement. Improving judicial interpretation and harmonizing it with the principles of trademark protection is urgent to ensure legal certainty and prevent misuse of trademark registration in bad faith. This research was conducted using a normative juridical approach with research specifications using analytical descriptive research. Secondary data is the source of data in this study with data types in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques use literature study then data analysis is carried out qualitatively. The results of the study stated that Article 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is the first step in suppressing the increase in trademark disputes, this is also related to the role of the DJKI in the trademark registration publication process. Thus, DJKI can change the publication method that can be easily accessed by trademark registrants. The judge's decision in deciding the trademark dispute studied, refers to Article 76 of Law Number 20 of 2016, this article specifically regulates the cancellation of a registered trademark. Based on considerations on the principle of good faith by considering the absence of imitation or piggybacking on the popularity of a previously registered trademark and the principle of unlawful acts with elements of causing misleading information or conditions where the public is confused in recognizing the identity of a product in question.

Keywords: ***Court Decisions, Trademark Similarities, Trademark Disputes*****.**